

KEPATUHAN PENGELOLA DAN SISTEM PEMUNGUTAN TERHADAP KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR: PERAN MODERASI TATA KELOLA PERPARKIRAN

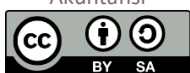
Wiwin Alief Bachtiar^{1*}, Umi Muawanah², Oyong Lisa³, Ronny Hendra Hertanto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Gajayana Malang, Malang, Indonesia

*e-mail: aliefbachtiar@upms.ac.id

Histori Artikel	ABSTRACT
Diterima: 12 Agustus 2026 Revisi: 16 September 2026 Disetujui: 17 September 2026 Diterbitkan: 17 September 2026 Keywords: Parking Attendant Compliance; Retribution Collection System; Parking Governance; Local Own-Source Revenue; PLS-SEM;	Purpose: This study examines the effect of manager compliance and the collection system on parking retribution contribution in Nganjuk Regency, and tests the moderating and direct role of parking governance on that relationship. Method: A quantitative explanatory approach was used with a census of 43 active parking management units in Nganjuk Regency. Data were collected via a Likert-scale questionnaire and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in SmartPLS 4.1.1.8 with bootstrapping of 5,000 resamples. Finding: Manager compliance ($\beta = 0.422$; $t = 5.011$; $p = 0.000$) and the collection system ($\beta = 0.442$; $t = 5.031$; $p = 0.000$) both have a positive and significant effect on parking retribution contribution. Parking governance significantly strengthens both relationships ($\beta = 0.477$, $t = 6.702$, $p = 0.000$ for compliance; $\beta = 0.405$, $t = 4.912$, $p = 0.000$ for the collection system) and also has a significant positive direct effect on parking retribution contribution ($\beta = 0.366$; $t = 3.036$; $p = 0.002$), together explaining 84.3 percent of its variance ($R^2 = 0.843$). Novelty: This study provides novel evidence that individual behavioral compliance, technical collection systems, and institutional governance are complementary rather than competing determinants of local parking retribution contribution, with parking governance simultaneously and significantly acting as both a moderating and a direct-effect variable, a full-support pattern rarely documented within a single PLS-SEM model at the district government level.

Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Literasi Akuntansi



Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota, di samping pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2018; Mardiasmo, 2019). Salah satu jenis retribusi jasa umum yang potensial namun rawan kebocoran adalah retribusi parkir di tepi jalan umum, karena sifat transaksinya yang tunai, tersebar di banyak titik, dan sangat bergantung pada perilaku petugas di lapangan (Mahmudi, 2019; Sulastiningsih et al., 2023). Di Kabupaten Nganjuk, retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan pada puluhan titik yang tersebar di pasar, puskesmas, taman, dan tempat wisata, sehingga efektivitas pemungutannya sangat menentukan kontribusinya terhadap PAD daerah.

Data realisasi retribusi parkir jalan umum Kabupaten Nganjuk periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang relatif stagnan, berkisar antara Rp6,21 miliar hingga Rp6,36 miliar per tahun, meskipun jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas ekonomi masyarakat terus bertumbuh (Nganjuk, 2024a). Stagnasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi riil dan realisasi penerimaan, yang lazim disebut sebagai kebocoran pendapatan (revenue leakage) dalam literatur keuangan publik (Sechero H. & Otinga, 2020). Kondisi ini menjadi perhatian karena retribusi parkir

semestinya dapat tumbuh seiring meningkatnya mobilitas masyarakat perkotaan, sehingga stagnasi realisasi memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kepatuhan pengelola maupun sistem pemungutan yang diterapkan.

Penelusuran awal di lapangan mengidentifikasi sejumlah persoalan tata kelola yang diduga menjadi penyebab stagnasi tersebut, antara lain praktik pemungutan oleh juru parkir tidak resmi tanpa memberikan layanan nyata, pungutan ganda terhadap pemegang parkir berlangganan, dugaan penyelewengan setoran oleh koordinator lapangan, serta lemahnya kepatuhan pencatatan dan penyeteroran harian (Nganjuk, 2024b). Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mewajibkan penerbitan karcis resmi untuk mencegah pungutan liar, namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya konsisten. Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa efektivitas sistem pemungutan retribusi sangat bergantung pada kepatuhan aparaturnya, bukan semata pada keberadaan regulasi maupun teknologi (Manurung, 2023; Millenia & Farida, 2022).

Fenomena menarik terjadi pascarevisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 yang menaikkan tarif parkir berlangganan kendaraan roda empat hingga 100 persen: realisasi PAD dari retribusi parkir pada tahun 2025 melonjak menjadi Rp8,96 miliar, atau 101,82 persen dari target yang ditetapkan. Perlu dicatat bahwa lonjakan nominal ini secara mekanis dipengaruhi oleh kenaikan tarif itu sendiri, sehingga tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai bukti empiris penguatan kepatuhan pengelola; kebijakan tarif tidak dimodelkan sebagai variabel dalam penelitian ini. Fenomena ini disajikan semata sebagai konteks yang memotivasi relevansi topik kepatuhan dan sistem pemungutan bagi optimalisasi retribusi parkir daerah, bukan sebagai bukti pendukung hipotesis penelitian..

Studi retribusi parkir terdahulu dapat dipetakan ke dalam tiga klaster, masing-masing menyisakan keterbatasan spesifik yang relevan dengan persoalan stagnasi retribusi di level kabupaten. Pertama, klaster deskriptif-kontributif (Algadri et al., 2023; Uyun & Rusliansyah, 2024) mengukur besaran kontribusi retribusi parkir terhadap PAD secara tabulatif, tanpa pengujian model kausal, sehingga tidak menjelaskan determinan perilaku di balik variasi kontribusi tersebut. Kedua, klaster sistem pemungutan berbasis teknologi (Abdillah et al., 2024; Suriyani & Effendy, 2023) menguji efektivitas e-parkir dan QRIS secara terisolasi dari variabel kepatuhan aparaturnya maupun konteks tata kelola kelembagaan, sehingga interaksi antara kualitas teknologi pemungutan dan perilaku petugas lapangan, yang menurut penelusuran awal di Kabupaten Nganjuk justru menjadi titik kritis kebocoran, belum tercakup. Ketiga, klaster tata kelola (Robinson et al., 2025; Rahmawati et al., 2025) memperlakukan tata kelola perpustakaan semata sebagai variabel independen tunggal, bukan sebagai kondisi kontekstual yang memoderasi hubungan kepatuhan dan sistem pemungutan terhadap kontribusi retribusi. Ketiadaan pengujian tata kelola secara simultan sebagai variabel moderasi dan *direct effect* dalam satu model struktural menjadi celah metodologis utama, di samping celah substantif berupa minimnya bukti empiris tentang determinan mana (kepatuhan individual atau sistem/tata kelola institusional) yang lebih dominan menjelaskan kontribusi retribusi pada level pemerintah kabupaten.

Penelitian ini memposisikan diri pada pertemuan ketiga celah tersebut: mengintegrasikan kepatuhan pengelola dan sistem pemungutan sebagai prediktor langsung, sekaligus menempatkan tata kelola perpustakaan secara simultan sebagai variabel moderasi dan variabel berpengaruh langsung, dalam satu model PLS-SEM pada konteks pemerintah kabupaten yang secara empiris menunjukkan gejala stagnasi retribusi (2020–2024). Secara teoretis, karena Compliance Theory, Public Finance Theory, dan Governance Theory dinaungi oleh mekanisme isomorfisme koersif, normatif, dan mimetik yang secara konseptual dipandang setara dalam Institutional Theory (DiMaggio & Powell, 2021), literatur belum banyak menyediakan bukti empiris tentang mekanisme isomorfisme mana yang secara relatif lebih dominan dalam konteks keuangan daerah. Penelitian ini karenanya turut berkontribusi pada perdebatan tersebut dengan menguji dominasi relatif tekanan koersif (kepatuhan) dibanding tekanan mimetik (tata kelola) pada retribusi parkir daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kepatuhan Pengelola dan Sistem Pemungutan terhadap Kontribusi Retribusi Parkir di Kabupaten Nganjuk, serta menguji peran moderasi dan pengaruh langsung Tata Kelola Perparkiran atas hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan Teori Kepatuhan dan Teori Tata Kelola dalam konteks keuangan daerah, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam merumuskan kebijakan optimalisasi retribusi parkir sebagai sumber PAD.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan Teori Institusional (*Institutional Theory*) sebagai *grand theory*, yang menjelaskan bagaimana organisasi, termasuk unit pengelola parkir sebagai bagian dari birokrasi pemerintah daerah, bergerak menuju kesamaan bentuk dan praktik (*isomorfisme*) agar memperoleh legitimasi dari lingkungannya (Dimaggio & Powell, 2021). Teori Institusional menekankan bahwa kebijakan tidak semata dipengaruhi oleh prinsip ekonomi neoklasik, melainkan juga oleh biaya transaksi, dinamika politik, dan norma sosial yang membentuk perancangan serta penerapannya (Babb & Brown, 2024; Kenneth Button, 2006). Studi mengenai Perth Parking Policy menunjukkan bahwa kebijakan parkir dipengaruhi oleh logika institusional yang kompleks dan hubungan antaraktor yang terus berubah (Babb & Brown, 2024). *Grand theory* ini menaungi tiga teori pendukung yang masing-masing merepresentasikan satu mekanisme *isomorfisme* yang berbeda namun setara kedudukannya: tekanan koersif dari regulasi daerah membentuk kepatuhan pengelola, dijelaskan oleh Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*); tekanan normatif profesi pengelolaan keuangan publik membentuk sistem pemungutan, dijelaskan oleh Teori Keuangan Publik (*Public Finance Theory*); dan proses mimetik antarunit pemerintah daerah membentuk praktik tata kelola, dijelaskan oleh Teori Tata Kelola (*Governance Theory*). Ketiganya adalah jalur berbeda menuju legitimasi institusional yang sama, sehingga dapat dinaungi *grand theory* yang sama tanpa saling tumpang tindih. *Public Sector Efficiency Theory* diposisikan berbeda dari ketiganya: teori ini bukan mekanisme *isomorfisme* keempat, melainkan teori pada level variabel hasil yang menjelaskan bagaimana keluaran dari ketiga tekanan institusional tersebut — kepatuhan, sistem pemungutan, dan tata kelola — bermuara pada efisiensi dan optimalisasi kontribusi retribusi terhadap PAD. Struktur teoretis penelitian ini dengan demikian berlapis dua: tiga teori institusional setara sebagai sumber pengaruh, dan satu teori muara yang menjelaskan variabel dampak.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menjelaskan kondisi ketaatan seseorang terhadap aturan yang berlaku, di mana kepatuhan aparatur pemungut mencerminkan kesadaran mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan (Tahar & Rachman, 2016; Zain & Wijoyanti, 2010). Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, kepatuhan pengelola dibentuk oleh sikap terhadap aturan, tekanan normatif organisasi, dan persepsi kontrol perilaku, sehingga semakin tinggi kepatuhan pengelola dalam mencatat, melapor, dan menyetorkan retribusi sesuai ketentuan, semakin besar potensi kontribusi retribusi parkir yang dihasilkan. Kepatuhan yang rendah, sebagaimana tercermin pada praktik pungutan ganda dan penyelewengan setoran, secara langsung menurunkan efektivitas penerimaan retribusi. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis: **H1**: Kepatuhan Pengelola berpengaruh terhadap Kontribusi Retribusi Parkir.

Teori Keuangan Publik (*Public Finance Theory*) menekankan pentingnya mekanisme pengumpulan pendapatan yang efektif, transparan, dan minim kebocoran (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2019). Mekanisme manual sering menghadapi kendala birokrasi dan risiko kebocoran, sementara penggunaan sistem elektronik seperti karcis digital dan QRIS terbukti meningkatkan efisiensi serta transparansi pemungutan (Mchwampaka & Bingireki, 2024; R. Kweka & A. Chikoyo, 2021). Dalam konteks retribusi parkir, sistem pemungutan mencakup penetapan tarif, metode pembayaran, pencatatan transaksi, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan di lapangan (Abdillah et al., 2024; Suriyani & Effendy, 2023). Semakin baik sistem pemungutan yang diterapkan, semakin besar potensi peningkatan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD. Berdasarkan uraian

tersebut, dirumuskan hipotesis: **H2**: Sistem Pemungutan berpengaruh terhadap Kontribusi Retribusi Parkir.

Sebagai variabel moderasi, tata kelola perparkiran, ditandai kejelasan aturan, pengawasan, dan pembinaan yang konsisten, diargumentasikan memperkuat pengaruh kepatuhan pengelola terhadap kontribusi retribusi parkir. Secara teoretis, argumen ini konsisten dengan logika isomorfisme koersif: tata kelola yang kuat berfungsi sebagai mekanisme penegakan (*enforcement*) yang mengonversi niat patuh pengelola menjadi perilaku patuh yang konsisten di lapangan, sedangkan tata kelola yang lemah membuka ruang penyimpangan meskipun niat kepatuhan individual tinggi. Komitmen pimpinan memperkuat pengaruh Good School Governance terhadap kinerja organisasi (Novitasari et al., 2022). Argumen ini juga diperkuat oleh Lisa et al (2014), yang membuktikan bahwa unit usaha dengan karakteristik organisasi tertentu memerlukan intensitas pengawasan eksternal yang berbeda untuk mencapai kinerja keuangan optimal, menunjukkan bahwa kepatuhan suatu pengelola tidak berdiri sendiri, melainkan hasilnya sangat bergantung pada kualitas mekanisme pengendalian dan pengawasan yang melingkupinya. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis: **H3**: Tata Kelola Perparkiran memoderasi pengaruh Kepatuhan Pengelola terhadap Kontribusi Retribusi Parkir.

Tata kelola perparkiran turut diduga memoderasi pengaruh sistem pemungutan terhadap kontribusi retribusi parkir, karena efektivitas suatu sistem pemungutan, termasuk sistem berbasis teknologi seperti e-parkir, sangat bergantung pada supervisi dan pengelolaan sumber daya manusia yang menyertainya (Rahmawati, 2024; Romasi & Ridwan, 2023). Tata kelola yang transparan dan akuntabel memastikan sistem pemungutan diimplementasikan secara konsisten di seluruh titik parkir, sehingga investasi pada sistem berdampak pada peningkatan penerimaan, bukan sekadar perubahan alat administratif semata. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis: **H4**: Tata Kelola Perparkiran memoderasi pengaruh Sistem Pemungutan terhadap Kontribusi Retribusi Parkir.

Public Sector Efficiency Theory menjelaskan bagaimana sektor publik menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya serendah mungkin, di mana kualitas tata kelola seperti transparansi dan digitalisasi pemerintahan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja sektor publik (Muzakki & Munif, 2025; Negri & Dincă, 2023). Sebagai muara dari ketiga tekanan institusional di atas, tata kelola yang baik diharapkan menekan kebocoran penerimaan dan mendorong optimalisasi kontribusi retribusi terhadap PAD secara langsung, sebagaimana ditunjukkan pada studi tata kelola parkir di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Buleleng (Rahmawati et al., 2025; Robinson et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis: **H5**: Tata Kelola Perparkiran berpengaruh terhadap Kontribusi Retribusi Parkir.

Berdasarkan kelima hipotesis tersebut, penelitian ini membangun model yang menempatkan Kepatuhan Pengelola (X1) dan Sistem Pemungutan (X2) sebagai variabel independen yang berpengaruh langsung terhadap Kontribusi Retribusi Parkir (Y), dengan Tata Kelola Perparkiran (Z) berperan ganda sebagai variabel moderasi pada kedua hubungan tersebut sekaligus sebagai prediktor langsung terhadap Y. Model dua lapis ini konsisten dengan struktur teoretis yang dibangun di atas: Teori Institusional menaungi tiga teori setara (Kepatuhan, Keuangan Publik, Tata Kelola) melalui tiga mekanisme isomorfisme yang berbeda, yang hasilnya bermuara pada *Public Sector Efficiency Theory* sebagai penjelas kontribusi retribusi parkir terhadap efisiensi penerimaan sektor publik di tingkat pemerintah kabupaten.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* untuk menguji hubungan struktural antarvariabel secara empiris (Sugiyono, 2018). Mengingat data primer dikumpulkan secara *cross-sectional* pada satu titik waktu, hubungan yang diuji bersifat asosiatif-struktural dan bukan kausalitas dalam pengertian temporal yang ketat. Lokasi penelitian adalah

Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dengan objek penelitian berupa unit pengelolaan parkir aktif yang berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

Unit analisis penelitian ini adalah unit pengelolaan parkir, bukan individu petugas secara personal; populasi berjumlah 43 unit yang tersebar di titik-titik pasar, puskesmas, taman, dan tempat wisata. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil dan seluruh anggotanya dapat diidentifikasi secara jelas, penelitian ini menggunakan metode sensus, sehingga seluruh 43 unit populasi dijadikan responden penelitian, bukan sampel yang ditarik secara acak (Sekaran & Bougie, 2020). Setiap unit diwakili oleh satu responden, yaitu petugas penanggung jawab/koordinator pengelolaan parkir pada unit bersangkutan, dengan pertimbangan bahwa posisi tersebut memiliki keterpaparan langsung terhadap praktik penyeteroran, pelaporan, dan pengawasan harian di titik parkir yang dikelolanya. Responden yang digunakan memiliki karakteristik khusus.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner berskala Likert 1 sampai 5, serta data sekunder berupa laporan realisasi retribusi parkir Kabupaten Nganjuk periode 2020–2025 yang digunakan sebagai data kontekstual untuk menggambarkan fenomena stagnasi penerimaan sebagaimana diuraikan pada bagian Pendahuluan, dan bukan sebagai sumber pengukuran langsung variabel dalam model struktural. Seluruh variabel dalam model PLS-SEM (Kepatuhan Pengelola, Sistem Pemungutan, Tata Kelola Perpustakaan, maupun Kontribusi Retribusi Parkir) diukur melalui persepsi diri (*self-report*) responden terhadap kondisi di unit yang dikelolanya, bukan melalui verifikasi silang dengan dokumen keuangan resmi tiap unit; keterbatasan ini konsisten dengan potensi *social desirability bias* yang telah diakui pada bagian Keterbatasan Penelitian.

Instrumen kuesioner terdiri dari 32 item pernyataan yang mengukur empat variabel penelitian, masing-masing diwakili oleh 8 item. Pengembangan instrumen dikembangkan sendiri oleh peneliti berdasarkan indikator teoretis di Landasan Teori. Kepatuhan Pengelola diukur melalui indikator ketepatan penyeteroran, pelaporan, integritas, dan penerapan tarif. Sistem Pemungutan diukur melalui indikator metode pembayaran, standarisasi, pengendalian operasional, dan pemanfaatan teknologi digital. Tata Kelola Perpustakaan diukur melalui indikator kejelasan aturan, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Kontribusi Retribusi Parkir diukur melalui persepsi responden atas rasio realisasi, proporsi terhadap PAD, pertumbuhan nominal, dan efektivitas pemungutan pada unit yang dikelolanya.

Data dianalisis menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.1.1.8, yang dipilih karena kemampuannya menangani model kompleks dengan variabel moderasi pada ukuran sampel yang relatif kecil tanpa memerlukan asumsi distribusi normal yang ketat (Hair Jr. et al., 2021). Evaluasi model dilakukan dalam dua tahap, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*). Signifikansi jalur diuji melalui prosedur *bootstrapping* sebanyak 5.000 *resample*, dengan kriteria signifikansi *t*-statistic lebih besar dari 1,96 atau *p*-value lebih kecil dari 0,05 (Henseler et al., 2016).

Evaluasi model pengukuran mencakup uji validitas konvergen melalui *outer loading* (*ideal* $\geq 0,708$) dan *Average Variance Extracted/AVE* ($\geq 0,50$), uji reliabilitas melalui *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* ($\geq 0,70$), serta uji validitas diskriminan melalui kriteria *Fornell-Larcker* dan rasio *Heterotrait-Monotrait* (HTMT $< 0,85$) (Fornell & Larcker, 1981; Henseler et al., 2016). Evaluasi model struktural mencakup uji multikolinearitas melalui *Variance Inflation Factor* (VIF $< 3,3$), koefisien determinasi (R^2), *effect size* (f^2) dengan kriteria 0,02/0,15/0,35 untuk efek kecil/menengah/besar (Cohen, 1988), *predictive relevance* ($Q^2_{predict}$), serta model fit melalui *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR).

Mengingat seluruh variabel diukur melalui instrumen kuesioner yang diisi oleh responden yang sama (petugas pengelola parkir), penelitian ini berpotensi menghadapi *common method bias* (CMB). Untuk mendeteksi hal tersebut, digunakan pendekatan *full collinearity test* melalui nilai *Variance*

Inflation Factor (VIF) pada seluruh konstruk dalam model PLS-SEM; apabila seluruh nilai VIF berada di bawah ambang batas 3,3, CMB dianggap bukan ancaman dominan terhadap validitas temuan (Kock, 2015).

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada seluruh unit pengelola parkir yang menjadi populasi penelitian, didampingi wawancara singkat untuk mengonfirmasi kondisi lapangan. Sebelum digunakan, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui evaluasi *outer model* pada tahap awal untuk memastikan seluruh item pernyataan valid dan reliabel sebelum dilanjutkan ke pengujian model struktural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian melibatkan 43 responden yang merupakan pengelola parkir di Kabupaten Nganjuk, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki (100%), dengan mayoritas (81,4%) telah bertugas lebih dari tiga tahun, menunjukkan pengalaman lapangan yang memadai untuk menilai kondisi pengelolaan parkir. Responden tersebar di seluruh 20 kecamatan, dengan konsentrasi terbanyak di Kecamatan Nganjuk (6 responden). Deskripsi variabel menunjukkan bahwa keempat variabel penelitian berada pada kategori sedang (interval 2,61–3,40) dengan skor yang relatif homogen, yaitu Kepatuhan Pengelola (3,00), Tata Kelola Perparkiran (2,99), Sistem Pemungutan (2,98), dan skor terendah pada Kontribusi Retribusi Parkir (2,95), mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap keempat aspek pengelolaan parkir relatif setara dan kontribusi retribusi terhadap PAD belum berada pada tingkat optimal.

Tabel 1
Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	Item	Mean	Kategori
Kepatuhan Pengelola	X1.1	3,047	Sedang
	X1.2	3,070	Sedang
	X1.3	3,047	Sedang
	X1.4	3,116	Sedang
	X1.5	3,093	Sedang
	X1.6	2,930	Sedang
	X1.7	2,744	Sedang
	X1.8	2,930	Sedang
Rata-rata Variabel		2,997	Sedang
Sistem Pemungutan	X2.3	3,023	Sedang
	X2.4	3,070	Sedang
	X2.5	2,953	Sedang
	X2.6	2,884	Sedang
Rata-rata Variabel		2,983	Sedang
Kontribusi Retribusi Parkir	Y.1	3,023	Sedang
	Y.2	2,884	Sedang
	Y.3	2,907	Sedang
	Y.4	3,163	Sedang
	Y.5	3,140	Sedang
	Y.6	2,837	Sedang
	Y.7	2,860	Sedang
	Y.8	2,744	Sedang
Rata-rata Variabel		2,945	Sedang
Tata Kelola Perparkiran	Z.1	3,000	Sedang
	Z.2	2,930	Sedang
	Z.3	2,977	Sedang
	Z.4	2,884	Sedang

Variabel	Item	Mean	Kategori
	Z.5	3,116	Sedang
	Z.6	3,163	Sedang
	Z.7	3,093	Sedang
	Z.8	2,767	Sedang
	Rata-rata Variabel	2,991	Sedang

Sumber: Data primer diolah (2026)

Evaluasi model pengukuran menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki *outer loading* di atas 0,708 (berkisar 0,791–0,912), melampaui ambang ideal yang disyaratkan. Sebelum mencapai kondisi tersebut, empat item pada indikator metode pembayaran dan pemanfaatan teknologi digital (X2.1, X2.2, X2.7, dan X2.8) dieliminasi pada tahap awal evaluasi *outer model* karena nilai *loading* yang rendah bahkan negatif, konsisten dengan kondisi lapangan yang seluruhnya masih menggunakan sistem pembayaran tunai (lihat Tabel 2). Seluruh konstruk juga dinyatakan reliabel dengan Cronbach's Alpha (0,885–0,950), Composite Reliability ρ_a dan ρ_c (0,920–0,959), serta Average Variance Extracted/AVE (0,690–0,743), seluruhnya di atas 0,70 dan 0,50. Uji validitas diskriminan menunjukkan nilai HTMT tertinggi hanya 0,571 (antara Kepatuhan Pengelola dan Kontribusi Retribusi Parkir), jauh di bawah ambang batas 0,85, dan kriteria Fornell-Larcker turut terpenuhi karena akar AVE setiap konstruk lebih besar dari korelasinya dengan konstruk lain. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel, sehingga layak digunakan untuk pengujian model struktural.

Tabel 2
Item Sistem Pemungutan yang Dieliminasi pada Tahap Evaluasi *Outer Model*

Item	Loading Awal	Loading Akhir	Keterangan
X2.1	0,093	-	Dieliminasi; item mengukur ketersediaan metode pembayaran non-tunai, tidak relevan karena seluruh unit masih tunai
X2.2	-0,342	-	Dieliminasi; item mengukur kemudahan memilih metode pembayaran non-tunai, tidak relevan pada kondisi tunai
X2.7	-0,073	-	Dieliminasi; item mengukur penggunaan pembayaran digital (QRIS), belum diterapkan di lapangan
X2.8	0,020	-	Dieliminasi; item mengukur manfaat pembayaran digital, belum dapat dinilai karena belum diterapkan

Sumber: Data primer diolah, output SmartPLS (2026)

Evaluasi model struktural menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,843 (R^2 adjusted = 0,822), yang berarti Kepatuhan Pengelola, Sistem Pemungutan, dan Tata Kelola Perparkiran secara bersama-sama mampu menjelaskan 84,3 persen variasi Kontribusi Retribusi Parkir, tergolong kategori kuat/substansial (Hair Jr. et al., 2021). Nilai Q^2 predict pada level konstruk sebesar 0,753 dan seluruh Q^2 predict pada level indikator bernilai positif (0,437–0,603), menunjukkan model memiliki predictive relevance yang besar, sementara seluruh nilai VIF inner model berkisar antara 1,05–1,22, jauh di bawah ambang batas 3,3, sehingga model bebas dari masalah multikolinearitas maupun common method bias. Dari sisi effect size, seluruh jalur dalam model menghasilkan f^2 dengan kategori besar

(> 0,35): interaksi Tata Kelola Perpajakan x Kepatuhan Pengelola memiliki f^2 tertinggi (1,281), diikuti Sistem Pemungutan ($f^2 = 1,180$), Kepatuhan Pengelola ($f^2 = 0,967$), interaksi Tata Kelola Perpajakan x Sistem Pemungutan ($f^2 = 0,745$), dan Tata Kelola Perpajakan ($f^2 = 0,700$), menunjukkan bahwa seluruh prediktor dalam model memberikan kontribusi yang substansial, tanpa satu determinan tunggal yang mendominasi secara ekstrem.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas (Inner VIF Values)

Hubungan Antar Variabel	VIF
Kepatuhan Pengelola terhadap Kontribusi Retribusi Parkir	1,169
Sistem Pemungutan terhadap Kontribusi Retribusi Parkir	1,052
Tata Kelola Perpajakan terhadap Kontribusi Retribusi Parkir	1,220
Tata Kelola Perpajakan x Kepatuhan Pengelola terhadap Kontribusi Retribusi Parkir	1,076
Tata Kelola Perpajakan x Sistem Pemungutan terhadap Kontribusi Retribusi Parkir	1,104

Sumber: Data primer diolah, output SmartPLS (2026)

Uji model fit menunjukkan nilai SRMR sebesar 0,083 untuk model estimasi (0,082 untuk model saturasi), mendekati ambang ideal 0,08 yang direkomendasikan untuk model konfirmatori (Hu & Bentler, 1999). Nilai yang sedikit di atas ambang ini masih dapat diterima mengingat literatur PLS-SEM menyatakan model eksploratif dengan variabel moderasi cenderung menghasilkan SRMR lebih tinggi dibandingkan model konfirmatori murni (Henseler et al., 2016). Kombinasi nilai R^2 , Q^2 predict, dan VIF yang sangat baik memberikan dukungan kuat terhadap kelayakan model secara keseluruhan.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan 5.000 resample pada taraf signifikansi 5% (t-statistic > 1,96 atau p-value < 0,05). Hasil pengujian kelima hipotesis penelitian disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Jalur	β	t-statistic	p-value	Keterangan
H1	Kepatuhan Pengelola → Kontribusi Retribusi Parkir	0,422	5,011	0,000	Diterima
H2	Sistem Pemungutan → Kontribusi Retribusi Parkir	0,442	5,031	0,000	Diterima
H3	Tata Kelola Perpajakan memoderasi Kepatuhan Pengelola	0,477	6,702	0,000	Diterima
H4	Tata Kelola Perpajakan memoderasi Sistem Pemungutan	0,405	4,912	0,000	Diterima
H5	Tata Kelola Perpajakan → Kontribusi Retribusi Parkir	0,366	3,036	0,002	Diterima

Sumber: Data primer diolah, output SmartPLS (2026)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kepatuhan Pengelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kontribusi Retribusi Parkir ($\beta = 0,422$; $t = 5,011$; $p = 0,000$), sehingga H1 diterima. Temuan ini sejalan dengan Teori Kepatuhan yang menegaskan bahwa kepatuhan aparaturnya mencerminkan kesadaran menaati ketentuan perundang-undangan (Tahar & Rachman, 2016), serta konsisten dengan kondisi lapangan Kabupaten Nganjuk di mana kebocoran penerimaan selama ini banyak bersumber dari perilaku individu petugas, seperti pungutan ganda dan penyelewengan setoran. Dengan effect size besar ($f^2 = 0,967$), kepatuhan pengelola terbukti

menjadi determinan yang kuat dan konsisten terhadap kontribusi retribusi parkir, baik secara teoritis maupun empiris, meskipun sebagaimana diuraikan berikut, kepatuhan bukan lagi satu-satunya determinan yang berpengaruh dalam model ini.

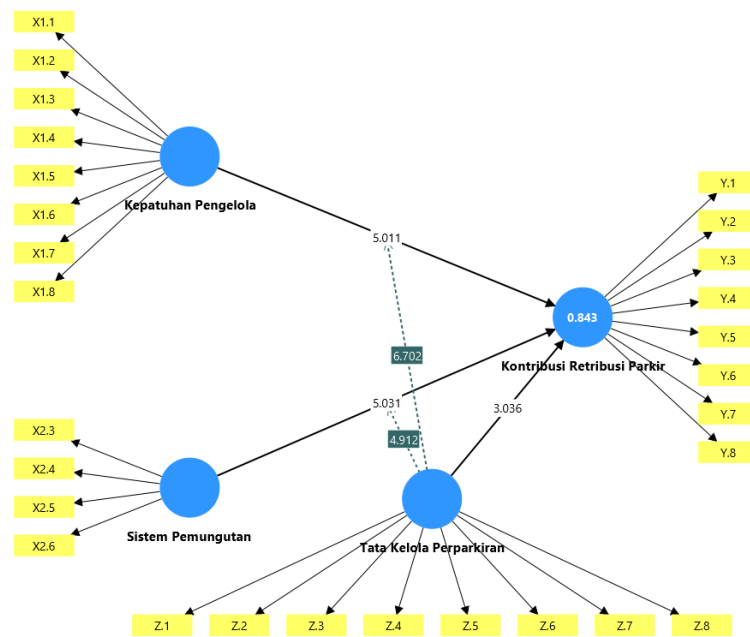
Sejalan dengan itu, Sistem Pemungutan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kontribusi Retribusi Parkir ($\beta = 0,442$; $t = 5,031$; $p = 0,000$), sehingga H2 diterima. Besaran koefisien ini bahkan sedikit melampaui Kepatuhan Pengelola, dengan effect size yang juga besar ($f^2 = 1,180$). Setelah empat item dengan outer loading rendah bahkan negatif dieliminasi pada tahap revisi instrumen, konstruk ini pada akhirnya diukur melalui empat item (X2.3-X2.6) yang secara konsisten merepresentasikan aspek pemungutan yang lebih terstandarisasi dan terkendali, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa penguatan pada aspek tersebut berperan penting dalam meningkatkan kontribusi retribusi. Temuan ini konsisten dengan Teori Keuangan Publik yang menekankan bahwa mekanisme pemungutan yang efektif dan minim kebocoran secara langsung mendorong optimalisasi penerimaan (Mahmudi, 2019; Mchwampaka & Bingireki, 2024).

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa peran moderasi Tata Kelola Perpajakan, baik pada pengaruh Kepatuhan Pengelola ($\beta = 0,477$; $t = 6,702$; $p = 0,000$; H3 diterima) maupun pada pengaruh Sistem Pemungutan ($\beta = 0,405$; $t = 4,912$; $p = 0,000$; H4 diterima), terbukti signifikan secara statistik, bahkan dengan effect size terbesar di antara seluruh jalur dalam model ($f^2 = 1,281$ dan $0,745$). Arah koefisien yang positif pada kedua interaksi ini konsisten dengan argumen teoretis yang dibangun sejak awal: tata kelola yang kuat berfungsi sebagai mekanisme enforcement yang mengonversi niat patuh pengelola menjadi perilaku patuh yang konsisten di lapangan, sekaligus memastikan investasi pada sistem pemungutan, termasuk komponen teknologi digital, benar-benar diimplementasikan secara konsisten di seluruh titik parkir sehingga berdampak pada penerimaan, bukan sekadar perubahan administratif semata. Menariknya, kedua koefisien interaksi ini justru lebih besar daripada koefisien pengaruh langsung Tata Kelola Perpajakan itu sendiri, mengindikasikan bahwa manfaat tata kelola yang baik paling terasa ketika bekerja bersama kepatuhan pengelola dan sistem pemungutan, bukan berdiri sendiri. Capaian signifikansi yang kuat pada kedua efek interaksi ini patut dicatat mengingat populasi penelitian yang relatif kecil (43 unit), karena secara statistik efek moderasi umumnya lebih sulit terdeteksi dibandingkan efek langsung (statistical power yang rendah akibat ukuran sampel kecil). Hal ini memperkuat keyakinan bahwa peran ganda Tata Kelola Perpajakan sebagai variabel moderasi bersifat nyata dan bukan sekadar kebetulan statistik.

Pengaruh langsung Tata Kelola Perpajakan terhadap Kontribusi Retribusi Parkir juga terbukti positif dan signifikan ($\beta = 0,366$; $t = 3,036$; $p = 0,002$; H5 diterima), sejalan dengan proposisi *Good Governance Theory* yang memprediksi bahwa institusi yang transparan dan akuntabel secara langsung mendorong kinerja penerimaan sektor publik (Kaufmann et al., 2000), serta konsisten dengan temuan pada studi tata kelola parkir di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Buleleng (Rahmawati et al., 2025; Robinson et al., 2025). Dengan diterimanya H5 berdampingan dengan H3 dan H4, Tata Kelola Perpajakan dalam penelitian ini terbukti menjalankan peran ganda secara nyata, yakni sebagai penguat (moderator) sekaligus determinan langsung, menegaskan bahwa mekanisme mimetik dalam Teori Institusional dapat bekerja bersamaan dengan mekanisme koersif dan normatif, bukan saling menggantikan.

Secara keseluruhan, pola hasil pengujian kelima hipotesis menunjukkan bahwa seluruh jalur yang diuji, baik pengaruh langsung Kepatuhan Pengelola dan Sistem Pemungutan, pengaruh langsung Tata Kelola Perpajakan, maupun peran moderasi Tata Kelola Perpajakan pada kedua hubungan tersebut, terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kontribusi Retribusi Parkir. Temuan inilah yang menjadi kontribusi ilmiah utama penelitian ini: pada konteks Kabupaten Nganjuk, kepatuhan perilaku individu, kualitas sistem pemungutan, dan tata kelola kelembagaan bukan determinan yang saling bersaing, melainkan bekerja secara komplementer dan saling menguatkan dalam mendorong kontribusi retribusi parkir. Hasil ini menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan daerah dari retribusi parkir memerlukan intervensi simultan pada ketiga aspek tersebut,

karena manfaat penguatan kelembagaan dan teknologi justru paling besar ketika berjalan beriringan dengan penguatan kepatuhan perilaku aktor di lapangan, sebagaimana diilustrasikan pada model struktural hasil bootstrapping (Gambar 1).



Gambar 1

Hasil Model Struktural (Path Coefficient dan T-Statistic)

Sumber: Output SmartPLS (2026)

KESIMPULAN dan SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepatuhan Pengelola dan Sistem Pemungutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kontribusi Retribusi Parkir di Kabupaten Nganjuk. Tata Kelola Perparkiran juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan, baik sebagai pemoderasi yang memperkuat pengaruh Kepatuhan Pengelola dan Sistem Pemungutan maupun sebagai prediktor langsung terhadap Kontribusi Retribusi Parkir, sehingga seluruh lima hipotesis penelitian (H1–H5) diterima. Model penelitian mampu menjelaskan 84,3 persen variasi Kontribusi Retribusi Parkir ($R^2 = 0,843$), dengan kemampuan prediksi out-of-sample yang besar ($Q^2_{\text{predict}} = 0,753$), menegaskan bahwa kepatuhan perilaku individu, kualitas sistem pemungutan, dan tata kelola kelembagaan secara bersama-sama dan saling menguatkan menentukan kontribusi retribusi parkir dalam konteks penelitian ini.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuan. Pertama, seluruh variabel diukur melalui persepsi diri (self-report) responden yang merupakan petugas pengelola parkir, hal ini berpotensi menimbulkan bias keinginan sosial (social desirability bias) yang cenderung menaikkan skor kepatuhan yang dilaporkan sendiri. Kedua, ukuran populasi yang kecil (43 unit), meskipun mampu mendeteksi seluruh efek moderasi secara signifikan pada penelitian ini, tetap membatasi generalisasi temuan ke populasi unit pengelolaan parkir di luar Kabupaten Nganjuk. Ketiga, lonjakan realisasi PAD pascakenaikan tarif tahun 2025 tidak dapat dipisahkan secara empiris dari efek kepatuhan perilaku maupun tata kelola karena kebijakan tarif tidak dimodelkan sebagai variabel kontrol. Keempat, karakteristik masa kerja responden (81,4% telah bertugas lebih dari tiga tahun) dilaporkan semata untuk menggambarkan profil dan kredibilitas responden dalam menilai kondisi lapangan, dan secara sengaja tidak dimasukkan sebagai variabel kontrol dalam model struktural, mengingat penelitian ini menggunakan metode sensus terhadap seluruh populasi unit pengelolaan parkir bukan sampel acak yang menuntut pengendalian heterogenitas individu, dengan fokus teoretis pada mekanisme kepatuhan, sistem pemungutan, dan tata kelola pada level unit, bukan pada karakteristik individual petugas. Dengan demikian, kemungkinan pengaruh masa kerja terhadap tingkat kepatuhan yang dilaporkan belum dapat disingkirkan secara statistik dalam penelitian ini. Kelima, nilai SRMR (0,083) yang sedikit di atas

ambang ideal 0,08 mengindikasikan masih terdapat ruang perbaikan pada kecocokan model secara keseluruhan meskipun indikator kelayakan model lainnya (R^2 , Q^2 predict, VIF) sangat baik. Keenam, konstruk Sistem Pemungutan pada penelitian ini murni merepresentasikan aspek standarisasi prosedur dan pengendalian operasional yang bersifat manual, karena item-item yang mengukur pemanfaatan metode pembayaran non-tunai dan digital dieliminasi pada tahap evaluasi outer model akibat seluruh unit pengelolaan parkir yang diteliti belum mengadopsi metode tersebut; dengan demikian, temuan penelitian ini belum dapat digunakan untuk menyimpulkan pengaruh pembayaran digital terhadap kontribusi retribusi parkir, dan memerlukan penelitian tersendiri pada lokasi yang telah menerapkannya. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sumber data ganda (self-report dan data administratif objektif per unit), memperluas populasi ke kabupaten/kota lain untuk meningkatkan daya statistik pengujian moderasi, memasukkan kebijakan tarif sebagai variabel kontrol eksplisit, serta mempertimbangkan masa kerja pengelola sebagai variabel kontrol untuk menguji potensi pengaruhnya terhadap kepatuhan yang dilaporkan.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk disarankan tidak memprioritaskan salah satu aspek secara terpisah, melainkan menjalankan penguatan kepatuhan individu pengelola parkir, penguatan standarisasi prosedur dan pengawasan pemungutan, serta penguatan tata kelola perpustakaan secara simultan, mengingat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiganya saling menguatkan satu sama lain. Perlu dicatat bahwa signifikansi pengaruh Sistem Pemungutan dalam penelitian ini murni dikonstruksikan oleh aspek standarisasi dan pengendalian operasional yang bersifat manual, karena seluruh unit pengelolaan parkir yang diteliti belum mengadopsi metode pembayaran non-tunai maupun digital sama sekali. Dengan demikian, perluasan sistem pembayaran digital (QRIS atau sejenisnya) merupakan area pengembangan yang sepenuhnya belum tergarap dan berpotensi menjadi pengungkit tambahan bagi kontribusi retribusi parkir di luar mekanisme yang telah terbukti signifikan pada penelitian ini, dengan catatan implementasinya tetap perlu diiringi supervisi tata kelola yang konsisten agar benar-benar berdampak pada penerimaan, bukan sekadar perubahan administratif semata. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan jumlah responden untuk menguji generalisasi pola saling-menguatkan ini, menguji secara khusus peran pembayaran digital pada lokasi yang telah mengadopsinya, serta menjajaki kemungkinan Tata Kelola Perpustakaan berperan sebagai variabel mediasi di samping peran ganda moderasi dan pengaruh langsungnya, guna memperkaya pemahaman atas hubungan antarvariabel yang diuji.

REFERENSI

- Abdillah, T., Arundaya, M. F. L., & Al Amin, M. N. F. (2024). Analisis Problem Tree Pada Kebijakan Pembayaran Parkir Elektronik di Kota Surabaya. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 439–452. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1142>
- Algadri, H., Manan, A., & Fatimah, S. (2023). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2), 117–127. <https://doi.org/10.29303/jap.v3i2.48>
- Babb, C., & Brown, G. (2024). Institutional dynamics in inner city parking policy: a history of the Perth Parking Policy. *Australian Planner*, 60(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/07293682.2024.2401385>
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (2021). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism And Collective Rationality In Organizational Fields. *The New Economic Sociology: A Reader*, 111–134. <https://doi.org/10.2307/2095101>

- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50. <https://doi.org/10.1177/002224378101800104>
- Hair Jr., J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Halim, A. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Salemba Empat.
- Henseler, J., Hubona, G., & Ray., P. A. (2016). Using PLS Path Modeling in New Technology Research: Updated Guidelines. *Industrial Management & Data Systems (IMDS)*, 116(1), 2–20. <https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2015-0382>
- Hu, L. t., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobato, P. (2000). Governance Matters: From Measurement to Action. *Finance & Development*, 37(2). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=188568
- Kenneth Button. (2006). The Political Economy of Parking Charges in “First” and “Second-best” Worlds. *Transport Policy*, 3(6), 470–478. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2006.05.004>
- Kock, N. (2015). Common method bias in PLS-SEM: A full collinearity assessment approach. *International Journal of e-Collaboration*, 11(4), 1–10. <https://doi.org/10.4018/ijec.2015100101>
- Lisa, O., Chandrarin, G., & Subiyantoro, E. (2014). Firm characteristics, demand for external auditing services and financial performance: an empirical study on cooperative enterprises in East Java, Indonesia. In *Asia-Pacific Management Accounting Journal* (Vol. 9, Number 2). <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/12342>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Manurung, M. H. W. (2023). Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpiang Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(4), 345–356. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i4.718>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV Andi Offset.
- Mchwampaka, A., & Bingireki, E. (2024). The Effect of Electronic Fiscal Device Management Systems on Revenue Collection: A Case of Ilala Municipal Council. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VIII (VII), 518–533. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2024.807045>
- Millenia, Z., & Farida, A. (2022). Tata Kelola Pendapatan Parkir: Petugas Parkir Dishub dan Non Dishub. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*, 15(2), 105–120. <https://ejournal.stiekia.ac.id/index.php/JUMPA/article/view/202>
- Muzakki, H., & Munif, M. (2025). Evaluating Public Sector Efficiency And Its Influence On Economic Development Across Nations. *International Journal of Economics and Development*, 1(1), 32–45. <https://doi.org/10.71305/ijed.v1i1.346>
- Negri, C., & Dincă, G. (2023). Public sector’s efficiency as a reflection of governance quality, an European Union study. *Plos One*, 18(9), e0291048. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291048>

- Nganjuk, R. (2024a). Retribusi parkir di Kabupaten Nganjuk belum memenuhi target PAD. Radar Nganjuk. <https://radarnganjuk.jawapos.com/politik-pemerintahan/2173666853/retribusi-parkir-di-kabupaten-nganjuk-belum-memenuhi-target-pad>
- Nganjuk, R. (2024b). Cegah pungli, juru parkir di Kabupaten Nganjuk wajib beri karcis. Radar Nganjuk. <https://radarnganjuk.jawapos.com/hukum-kriminal/2173715240/cegah-pungli-juru-parkir-di-kabupaten-nganjuk-wajib-beri-karcis>.
- Novitasari, I. I., Rosidi, R., & Muawanah, U. (2022). Komitmen pimpinan sebagai moderasi pengaruh good school governance terhadap kinerja sekolah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(1), 101–111. <https://doi.org/10.21067/jem.v18i1.6535>
- R. Kweka, J., & A. Chikoyo, R. (2021). Electronic Revenue Collection System for Improving Local Government Authorities Revenue in Tanzania: A Case of Moshi Municipal Council, Kilimanjaro Region. *Journal of Media & Management*, 1–6. [https://doi.org/10.47363/jmm/2021\(3\)125](https://doi.org/10.47363/jmm/2021(3)125)
- Rahmawati, D. (2024). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Melalui E-Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/50762>
- Rahmawati, P. I., Indrawan, G., Yudiaatmaja, F., Kusumayani, N. M. N., & Widyastuti, M. A. (2025). Kajian Potensi Dan Tata Kelola Parkir Di Kabupaten Buleleng. *Saraswati: Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng*, 4(1), 64–88. <https://doi.org/10.70986/saraswati.v4i1.66>
- Robinson, Ali Yusri, & Zulkarnaini. (2025). Tata Kelola Parkir Di Kota Pekanbaru Tahun 2023-2024. *Jurnal Niara*, 18(2), 616–625. <https://doi.org/10.31849/6yxjse70>
- Romasi, I., & Ridwan, M. (2023). Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan The Effectiveness of Use of Electronic Parking Systems (E-Parking) In Realizing Smart City In Medan City. *XIX(2)*, 276–297. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.184>
- Sechero H., & Otinga, H. N. (2020). Determinants of revenue generation in county governments in Kenya; A case Of Busia County Government. *The Strategic Journal of Business & Change Management*, 7(1), 357–375. <https://doi.org/10.61426/sjbcm.v7i1.1532>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods For Business : A Skill Building Approach* (8th ed. (Asia Edition)). Hoboken: Wiley.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Alfabeta.
- Sulastiningsih, S., Setyowati, H., Puteh, M., & Saputri, Y. E. (2023). Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 53–69. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i1.552>
- Suriyani, Y. I., & Effendy, L. (2023). Peran Penggunaan QRIS Dalam Memoderasi Pengaruh Sistem Penyetoran Retribusi Parkir Terhadap Kepatuhan Pemungut Retribusi. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 511–524. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7782>
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2016). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1). Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1316>
- Uyun, L. L., & Rusliansyah. (2024). Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Kinerja : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 21(1), 97–104. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5558216>

Zain, M., & Wijoyanti. (2010). Manajemen Perpajakan. Salemba Empat.